

## DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi 1. PT INDEKS, Jakarta.
- Devas, Nick., Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. UI Press, Jakarta.
- Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. UI Press, Jakarta.
- Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua. *Laporan Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2016*.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2007. *Pedoman Nasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Departemen Keuangan RI, Jakarta.
- Gujarati, D. 1995. *Basic Econometrics*. Third Edition. Mc-Graw Hill Inc, New York.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hali, S.M. 2016. Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*. Volume 1, Nomor 1: 65-81
- Koswara. 2000. *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Penerbit Yayasan Pariba, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Keempat. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.



- Lin, C.Y.C dan Zheng, J. 2014. The Optimal Gasoline Tax for China. *Theoretical Economic Letters*. Volume 4 (April): 270-278. Diakses pada 15 Juni 2017. <http://dx.doi.org/10.4236/tel.2014.44037>
- Mardiasmo, dan Makhfatih. A. 2000. Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang. *Laporan akhir tidak dipublikasikan*, Kerjasama Pemerintah daerah Magelang dengan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi. UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2001. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mawajje, J., dan Munyambonera, E.F. 2016. *Tax Revenue Effects of Sectoral Growth and Public Expenditure in Uganda*. Research Series. No. 125. Economic Policy Research Centre, Uganda. Diakses pada 28 Februari 2017. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/saje.12127/pdf>
- Mayeres, I dan Proost, S. 2013. The Taxation of Diesel Cars in Belgium- Revisited. *Energy Policy*. Volume 54 (Maret), 33-41. Diakses pada 15 Juni 2017. <http://www.elsevier.com/locate/enpol>.
- Musgrave, R.A., dan Musgrave, P.B. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. Mc Graw-Hill, New York
- Ofoegbu, G.N., Akwu, D.O., dan Oliver, O., 2016. Empirical Analysis of Effect of Tax Revenue on Economic Development of Nigeria. *International Journal of Asian Social Science*, Volume 6 (10):604-613. Diakses pada 28 Februari 2017. <https://www.researchgate.net/publication/303543793>
- Pambudhi, A. 2010. Potensi Pendapatan Asli Daerah dari Perkebunan Kelapa Sawit dan Hutan Bekas Tebangan di Kalimantan Timur. *Tesis tidak diterbitkan*, Program Pasca Sarjana MEP. UGM, Yogyakarta.
- Pemerintah Provinsi Papua. 2011. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jayapura.
- Pemerintah Provinsi Papua. 2016. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Jayapura.



- Raczkowski, K. 2015. Measuring tax Gap in The European Economy. *Journal of Economic and Management*, Vol. 21 (3): 58-71. Diakses pada 28 Februari 2017. [http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/\\_migrated/content\\_uploads/04\\_36.pdf](http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/04_36.pdf)
- Raksaka, Mahi. 2005. Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. VI No.1, Juli: 39-49.
- Republik Indonesia. 1996. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017. Jakarta.
- Ritonga, I.T. 2014. *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Santosa. 1995. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Edisi 1. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Syaukani., Afan, G., dan Ryaas, R., 2002. *Otonomi Daerah: Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tabari, N.A.Y., dan Soltantooyeh, M. 2014. Estimation of Potential Taxable Capacity of the Developed Oil-Exporter Countries. *Applied Mathematics and Engineering Management and Technology*, Vol 2 (2): 378-384. Diakses pada 20 April 2017. [www.amiemt-journal.com](http://www.amiemt-journal.com)
- Tilaar, L. 2010. Potensi Pajak Daerah: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Gorontalo 2007-2009. *Tesis tidak diterbitkan*, Program Pasca Sarjana MEP. UGM, Yogyakarta.



- Wardhani, S.L. dan Alghifari. 2007. *Teknik Proyeksi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Pertama. BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Kedua. EKONOSIA UII. Yogyakarta.
- Widayat, Wahyu. 2016. *Ekonomika Mikro. Catatan Kuliah*. 13 September 2016. MEP UGM, Yogyakarta.